

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016-2020

Hesty Theresia Salle¹

hezty.salle@gmail.com

Arius A. Kambu²

Elia Madatu Tandililing³

Agustinus Salle⁴

Klara Wonar⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Papua provincial government in 2016-2020. The analysis method used is the descriptive analysis method. This study provides results that based on the independence ratio, the Regional Government of Papua Province is still in an instructive pattern, where the role of the Central Government is still dominant. Then from the calculation of the effectiveness and efficiency of PAD shows that the Regional Government has a good performance in realizing the planned PAD, as well as in terms of efficiency it is good enough to reduce regional spending. Then from the calculation of the income growth ratio, there is a trend of increasing the amount of regional income although it is not too high, as well as from the ratio of expenditure growth every year there is an increase in regional spending.

Key words: *Financial performance*

PENDAHULUAN

Dalam organisasi sektor publik terutama dalam Pemerintah Daerah pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah daerah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Anshori, 2019). Dengan dilakukannya analisis laporan keuangan dari pemerintah akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Tabel 1.
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2016	12.567.839.768.232,00	11.968.494.421.588,00	599.345.346.644,00
2017	13.006.812.664.926,00	13.303.282.243.301,00	-296.469.578.375,00
2018	13.489.981.203.764,70	13.186.886.938.770,00	303.094.264.994,68
2019	15.239.936.933.219,00	13.421.675.432.410,60	1.818.261.500.808,39
2020	13.030.852.042.529,30	12.606.997.656.660,60	423.854.385.868,73
Total	67.335.422.612.671,00	64.487.336.692.730,20	2.848.085.919.940,80

^{1, 2, 3, 4, 5} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Sumber: LHP Provinsi Papua 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2016-2019 Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 1,162% dari tahun 2019. Demikian juga dari sisi belanja mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,104%.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menganalisis laporan keuangan dari pemerintah daerah akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan telah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Anshori, 2019).

Penelitian Anshori (2019) memberikan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, yang dilihat berdasarkan realisasi PAD serta pajak daerah yang tergolong efisien, namun tingkat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan sangat rendah sehingga kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Lalu Harahap (2020) memberikan hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Demikian juga penelitian Mailangkay et al., (2020) yang memberikan hasil bahwa berdasarkan rasio efektifitas kinerja keuangan Kota Bitung sudah sangat efektif dan dari hasil efisiensi juga sudah tergolong efisien. Sedangkan

rasio kemandirian masih tergolong pola hubungan instruktif karena masih lebih didominasi peran Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2016-2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 yang diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan (Susanto, 2019). Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Mahmudi, 2007):

1. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2.
Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Anshori, 2019

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 3.
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PT terhadap TPD	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Anshori, 2019

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat + Pinjaman}}$$

Tabel 4.
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Anshori, 2019

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas PAD

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai nilai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik (Mahmudi, 2007) dalam (Anshori, 2019).

b. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, artinya semakin kecil rasio ini maka semakin baik. (Mahmudi, 2007) dalam (Anshori, 2019).

5. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t - 1}{\text{Pendapatan Tahun } t - 1}$$

Keterangan:

Tahun t : Tahun yang dihitungTahun $t-1$: Tahun sebelumnya

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}$$

Keterangan:

Tahun t : Tahun yang dihitungTahun $t-1$: Tahun sebelumnya**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Derajat Desentralisasi

Tabel 6.**Derajat Desentralisasi Provinsi Papua Tahun 2016-2022(persen)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Keterangan
2016	1.019.732.912.605,00	12.567.839.768.232,00	8,11%	Sangat Kurang
2017	1.015.781.099.671,00	13.006.812.664.926,00	7,81%	Sangat Kurang
2018	1.050.372.166.511,65	13.489.981.203.764,70	7,79%	Sangat Kurang
2019	2.027.638.465.326,97	15.239.936.933.219,00	13,30%	Kurang
2020	1.388.510.064.435,57	13.030.852.042.529,30	10,66%	Kurang

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pada tahun 2016 presentase rasio diperoleh sebesar 8,11% dan terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 7,81% dan tahun 2018 sebesar 7,79%. Kemudian pada tahun 2019 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesar 13,30%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,66%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 2.027.638.465.326,97. Dari hasil ini bisa terlihat secara keseluruhan bahwa kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang karena berada pada skala 00,00-10,00% di tahun 2016-2018, namun sedikit mengalami kenaikan ke skala 10,01-20,00% atau dalam kategori kurang.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 7.
Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah (persen)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Keterangan
2016	11.542.875.532.914,00	12.567.839.768.232,00	91,84%	Sangat Tinggi
2017	11.985.703.424.562,00	13.006.812.664.926,00	92,15%	Sangat Tinggi
2018	12.435.094.594.168,00	13.489.981.203.764,70	92,18%	Sangat Tinggi
2019	13.197.082.407.374,00	15.239.936.933.219,00	86,60%	Sangat Tinggi
2020	11.637.579.336.056,00	13.030.852.042.529,30	89,31%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah, 2022

Rata-rata rasio ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dari tahun 2016-2020 adalah sebesar 90,42% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua sebesar 91,84% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 92,15%. Kemudian di tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan juga sebesar 92,18%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 86,60% dan ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 89,31%. Meskipun rasio ketergantungan di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun sebelumnya yakni dari 2016-2018, namun tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 8.
Derajat Kemandirian Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pusat dan Pinjaman	Rasio	Pola Hubungan
2016	1.019.732.912.605,00	11.542.875.532.914,00	8,83%	Instruktif
2017	1.015.781.099.671,00	11.985.703.424.562,00	8,47%	Instruktif
2018	1.050.372.166.511,65	12.435.094.594.168,00	8,45%	Instruktif
2019	2.027.638.465.326,97	13.197.082.407.374,00	15,36%	Instruktif
2020	1.818.261.500.808,39	12.131.993.129.600,00	14,99%	Instruktif

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada kemandirian daerah. Hal ini terlihat dari masih besarnya dana yang

diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dari tahun 2016-2020 dari Pemerintah Pusat yang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Walaupun mengalami kenaikan di tahun 2019-2020, namun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola instruktif karena masih tergolong dalam interval 0-25% dimana peranana pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 9.
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Keterangan
2016	1.019.732.912.605,00	1.161.421.531.600,00	87,80%	Kurang Efektif
2017	1.015.781.099.671,00	1.362.335.585.796,00	74,56%	Kurang Efektif
2018	1.050.372.166.511,65	1.406.405.036.046,00	74,68%	Kurang Efektif
2019	2.027.638.465.326,97	1.931.722.249.561,00	104,97%	Efektif
2020	1.388.510.064.435,57	1.060.453.475.377,00	130,94%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Diharapkan kedepannya Pemerintah Provinsi Papua dapat terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatannya yang telah ada dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

b. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 10.
Efisiensi PAD Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan Daerah	Rasio	Keterangan
2016	11.968.494.421.588,00	12.567.839.768.232,00	95,23%	Efisien
2017	13.303.282.243.301,00	13.006.812.664.926,00	102,28%	Tidak Efisien
2018	13.186.886.938.770,00	13.489.981.203.764,70	97,75%	Efisien
2019	13.421.675.432.410,60	15.239.936.933.219,00	88,07%	Efisien
2020	12.606.997.656.660,60	13.030.852.042.529,30	96,75%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Provinsi Papua masuk dalam kategori efisien, hal ini dapat terlihat dari hasil perhitungan rasio dimana rasio berada dibawah 100%. Dapat dikatakan kinerja pemerintah Provinsi Papua sudah cukup baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

5. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 11.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan tahun t-1	Rasio
2016	12.567.839.768.232,00	11.805.767.353.119,00	6,46%
2017	13.006.812.664.926,00	12.567.839.768.232,00	3,49%
2018	13.489.981.203.764,70	13.006.812.664.926,00	3,71%
2019	15.239.936.933.219,00	13.489.981.203.764,70	12,97%
2020	13.030.852.042.529,30	15.239.936.933.219,00	-14,50%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah dari tahun 2016 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan berdasarkan pengukuran rasio terlihat bahwa dari tahun 2016-2018 terjadi tren kenaikan pendapatan walaupun tidak terlalu tinggi, kemudian meningkat tajam pada tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 12.
Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Realisasi Belanja Tahun t	Realisasi Belanja tahun t-1	Rasio
2016	7.396.280.536.217,00	7.275.918.304.885,00	1,65%
2017	7.921.705.609.561,00	7.396.280.536.217,00	7,10%
2018	8.194.294.733.286,97	7.921.705.609.561,00	3,44%
2019	10.302.640.234.202,60	8.194.294.733.286,97	25,73%
2020	9.530.922.395.281,60	10.302.640.234.202,60	-7,49%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2016-2019 realisasi belanja mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini juga bisa terlihat dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja, dimana pada tahun 2016 sebesar 1,65% yang kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 7,10% lalu mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 3,44%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang drastis menjadi 25,73% dan mengalami penurunan di tahun 2020 -7,49%. Hal ini berarti bahwa setiap tahun realisasi belanja mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi Pemerintah Provinsi Papua termasuk dalam kategori sangat kurang. Lalu dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian memberikan hasil yakni masih berada pada pola instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat masih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian dari perhitungan efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, dan dari sisi efisiensi termasuk dalam kategori efisien atau dapat dikatakan kinerja Pemerintah Provinsi Papua sudah cukup baik dalam menekan belanja daerahnya. Lalu dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan terlihat bahwa ada trend peningkatan jumlah pendapatan daerah dari tahun ke tahun walaupun tidak terlalu tinggi, begitu juga dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam hal belanja di Pemerintah Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2).
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bernardin, H. J., & Russel, J. E., A. (1993). *Humans Resources Management: an Experimental Approach, International Edition*. Singapore: McGraw Hill.Inc.

- Harahap, H, F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Harjito, Y., Nugraha, G. P. S., & Yulianto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri*, 5(1).
- Khairunnisa. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Meda Tahun 2012-2016*.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., & Paulina V. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 8(3), 278–285.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keem).
- Sudarsana. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4).
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun. (2014). *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017. *JETAP*.